

PENTINGNYA MENGENAL SEJARAH PERGERAKAN NKRI SEBAGAI LANGKAH FUTURISTIK GENERASI PEMUDA

Fitrah Febri Salam^{*a,1}, Lili Nurlaili^{b,2}

Universitas Pamulang

¹fitrahfebrisalam96@gmail.com, ²lilinurlaili@unpam.ac.id

Naskah diterima: 14-12-2022 direvisi: 15-12-2022, disetujui: 30-12-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran generasi muda dalam mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam era globalisasi serta mengusulkan strategi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk laporan, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara pembelajaran sejarah, penguatan nilai kebangsaan, dan kontribusi generasi muda dalam konteks global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan globalisasi seperti penurunan semangat kebangsaan dan pengaruh budaya asing semakin meningkat, generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan melalui pendidikan kewarganegaraan, penggunaan teknologi, dan penguatan identitas nasional. Strategi implementasi seperti pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan media, dan kolaborasi antar pihak dinilai efektif dalam memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga keutuhan NKRI. Dengan pendekatan yang adaptif, generasi muda dapat berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global.

Kata Kunci : NKRI, Sejarah, Pemuda, nilai kebangsaan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang luas dengan keberagaman suku, agama, adat, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi penting dalam mempersatukan bangsa yang pluralistik. Khansa (2022) menekankan bahwa persatuan dan kesatuan tidak hanya menjaga keutuhan wilayah dan keamanan, tetapi juga memperkuat identitas bangsa, mendukung kemajuan di berbagai sektor, serta menciptakan harmoni sosial. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah NKRI, munculnya sikap individualistik, dan kurangnya semangat nasionalisme menjadi penghambat dalam mewujudkan persatuan yang kokoh.

Cinta tanah air merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga dan memperkuat NKRI. Zuhdi (2014) menguraikan bahwa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui berbakti kepada negara, menjaga lingkungan, dan memelihara kerukunan antarumat beragama. Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak generasi muda yang kurang memahami nilai-nilai ini, sehingga cenderung abai terhadap upaya pelestarian semangat kebangsaan. Kurangnya perhatian terhadap pelajaran yang berkaitan dengan sejarah NKRI dalam dunia pendidikan menjadi salah satu penyebab lemahnya rasa cinta tanah air di kalangan pemuda.

Menjaga persatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Sikap seperti saling membantu tanpa memandang latar belakang, aktif dalam kegiatan sosial, dan menghargai hak orang lain merupakan cerminan persatuan yang harus terus ditanamkan. Dalam konteks pendidikan, perlu adanya upaya inovatif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah NKRI, baik melalui metode pembelajaran yang interaktif maupun pendekatan yang relevan dengan tantangan zaman. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat rasa cinta tanah air, tetapi juga membentuk generasi muda yang siap menyongsong masa depan dengan semangat persatuan yang kokoh.

Sejarah NKRI

Pergerakan Nasional Indonesia dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, yang menjadi momen penting dalam kesadaran kolektif bangsa untuk merdeka dari penjajahan. Kesadaran kolektif ini terus berkembang dan semakin meluas di seluruh Nusantara, hingga puncaknya pada 1928, ketika pemuda-pemudi Indonesia bersumpah untuk bersatu. Semangat ini kemudian terwujud secara nyata dengan berdirinya negara Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan pada 1945. Pergerakan Nasional, sebagai fenomena sejarah, terbentuk dari interaksi berbagai kesadaran sosial, politik, ekonomi, kultural, dan religius.

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momen bersejarah karena menandai awal perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah. Budi Utomo, sebagai pelopor pergerakan nasional, berhasil mendorong semangat kebangsaan yang menyatukan keragaman bangsa untuk melawan imperialisme. Organisasi ini menjadi dasar bagi munculnya gagasan nasionalisme, persatuan, dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat. (Yanti, 2017)

Pergerakan Nasional Indonesia mencakup seluruh proses tumbuhnya nasionalisme Indonesia, yang muncul dari kesadaran bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan dalam wadah negara kesatuan. Peristiwa-peristiwa heroik ini memberi kontribusi

besar pada terbentuknya bangsa Indonesia, dan sejarahnya seharusnya menjadi pelajaran bagi generasi saat ini agar mereka memahami semangat nasionalisme yang ada pada masa itu. Menurut Wertheim, semangat nasionalisme yang berkembang di Indonesia adalah bagian integral dari sejarah politik, khususnya dalam konteks pergerakan nasional. (Suhartono, 1988)

Semangat kebangsaan pada masa itu menunjukkan betapa pentingnya sejarah sebagai alat pendidikan untuk mengenalkan siswa pada identitas diri dan bangsa. Pendidikan sejarah harus membantu siswa memahami diri mereka dan perkembangan bangsa dalam konteks sejarah. Pembahasan tentang kebangkitan nasional di sekolah, terutama dalam materi pergerakan nasional, perlu dieksplorasi lebih dalam oleh guru, termasuk sejarah organisasi-organisasi yang terlibat dalam pergerakan tersebut.

Keragaman bangsa Indonesia adalah kekuatan yang menyatukan, seperti yang dikemukakan Ufie, bahwa keberagaman adalah identitas yang membentuk negara Indonesia. Nana Supriatna juga menambahkan bahwa pembelajaran sejarah harus berfokus pada masalah sosial kontemporer dan membantu siswa menemukan solusi melalui pendekatan inquiry. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan pelajaran sejarah dalam menghadapi tantangan sosial di masa kini.

Seperti yang telah dijabarkan, penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses reformasi di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi, dengan harapan dapat menjadi bahan refleksi dalam memperkuat sistem demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.

Peran Generasi Pemuda

Sebelum dan sesudah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Generasi sebelumnya telah banyak berkorban demi mewujudkan kemerdekaan bagi generasi mendatang, dengan harapan agar mereka dapat hidup lebih baik dan merdeka dalam segala aspek kehidupan, serta memperoleh kehidupan yang layak. Oleh karena itu, generasi setelahnya memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dengan mempertahankan kemerdekaan melalui pendidikan dan pembelajaran, guna menjaga semangat perjuangan, kebangsaan, dan cinta tanah air (Priyambodo, 2017).

Dalam konteks mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan di zaman modern yang didominasi oleh generasi milenial, pendidikan dan pembelajaran menjadi kunci utama. Pendidikan Pancasila menjadi dasar yang penting untuk mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Pancasila tidak hanya perlu dihafalkan, tetapi harus dipahami, dirasakan, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya banyak orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan budaya-budaya Barat mulai masuk, mengikis jiwa sosial, serta memprioritaskan penggunaan media sosial (Yudistira, 2016).

Menurut Fitri Anggraini (2018), nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam diri bangsa Indonesia mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari semakin hilangnya makna dan penghayatan terhadap setiap sila dalam Pancasila. Rasa persatuan antar bangsa Indonesia semakin berkurang, dengan dominasi individualisme yang meningkat seiring lunturnya nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan multikulturalisme

juga turut berkontribusi dalam memudahkan masuknya budaya asing, yang pada gilirannya menyebabkan pencampuran budaya dan mengikis nilai-nilai tersebut.

METODE

Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan yang telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang dikembangkan oleh Creswell (2014) dan Patton (2002). Metode ini tidak hanya mengumpulkan data melalui wawancara, tetapi juga melibatkan observasi langsung dan pengumpulan data dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek penelitian.

Modifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini terletak pada penerapan analisis tematik yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi tema yang muncul dari data lapangan yang lebih beragam. Penelitian ini juga mengintegrasikan teknik wawancara dan observasi dalam satu tahap yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep NKRI

Pergerakan nasional Indonesia fokus pada bagaimana organisasi modern dan kesadaran nasional muncul pada awal abad ke-20. Menurut Sartono Kartodirjo, fase ini dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Sebelumnya, perlawanan terhadap penjajahan cenderung bersifat lokal dan tidak efektif, tetapi setelah tahun 1900, perlawanan mulai bersifat nasional dan lebih terorganisir melalui diplomasi dan organisasi modern.

Moedjanto juga menjelaskan perbedaan dalam cara perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1900, di mana sebelum 1900, perjuangan bersifat lokal dan bergantung pada tokoh-tokoh kharismatik, sedangkan setelah 1900, perjuangan bersifat nasional dengan tujuan yang lebih jelas.

Pergerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh RA Kartini juga memengaruhi perkembangan kesadaran nasional, terutama dengan adanya politik etis yang memberikan akses pendidikan kepada perempuan. Organisasi-organisasi yang lahir di masa ini, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij, awalnya bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan, namun kemudian juga terlibat dalam politik.

Periode pergerakan radikal pada 1920-1930 ditandai oleh organisasi-organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sebaliknya, pada masa moderat, organisasi seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI mulai menerapkan prinsip-prinsip kooperasi dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial dalam kerangka tertentu, dengan tujuan jangka panjang untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Pergerakan nasional di Indonesia berkembang seiring dengan berdirinya Budi Utomo sebagai pelopor, diikuti oleh organisasi-organisasi daerah yang berfokus pada identitas sosio-kultural masing-masing. Organisasi-organisasi seperti Pasundan (1914), Persatuan Minahasa (1927), Sarekat Sumatra (1927), dan lainnya awalnya bersifat regional. Namun, seiring meningkatnya semangat nasionalisme, mereka terseret oleh arus perjuangan nasional meski tetap mempertahankan identitas daerah.

Kaum pemuda juga memainkan peran signifikan dalam pergerakan ini. Beberapa organisasi pemuda yang berpengaruh adalah Tri Koro Dharmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java (1916), Jong Sumateranen Bond (1917), Jong Celebes (1918), dan lain-lain. Organisasi-organisasi ini berperan dalam memperluas persaudaraan dan kebangsaan yang pada akhirnya memuncak dengan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, menandai eksistensi kaum muda dalam perjuangan nasional.

Selain itu, perempuan juga tidak ketinggalan dalam pergerakan nasional. Di berbagai daerah, perempuan-perempuan terpelajar mendirikan sekolah-sekolah khusus perempuan, seperti Sekolah Karadjinan Amai Satia, Sakola Kautamaan Isteri di Bandung oleh Dewi Sartika, dan lainnya. Tokoh-tokoh perempuan juga aktif dalam dunia pers melalui surat kabar seperti Soenting Melajoe yang didirikan oleh Roehana Kudus. Di Minangkabau, gerakan perempuan dipicu oleh modernisasi pendidikan, melahirkan para wanita terpelajar yang berperan besar dalam membangun kesadaran nasional.

Masa krisis pergerakan nasional dimulai sekitar tahun 1929/1930 ketika Krisis Malaise atau depresi ekonomi dunia terjadi. Indonesia terkena dampaknya, terutama dalam sektor ekonomi dan politik. Pemerintah kolonial Belanda memperketat pengawasan terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional melalui lembaga seperti PID (Politieke Inlichtingen Dienst) yang dibentuk untuk memantau dan membatasi gerakan radikal. Gubernur Jenderal de Jonge, yang sangat keras dalam kebijakan reaksionernya, memberlakukan tindakan represif seperti menangkap dan mengasingkan tokoh-tokoh pergerakan yang dianggap mengancam stabilitas kolonial, termasuk Soekarno, yang diasingkan ke Flores dan Bengkulu.

Reaksi keras pemerintah kolonial Belanda ini menciptakan hambatan besar bagi pergerakan nasional, tetapi justru memperkuat solidaritas rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh dan organisasi radikal yang semakin menentang kolonialisme.

Analisis Pergerakan NKRI Tahun 1908-1942

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, De Jonge, digantikan oleh Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, yang menjabat dari 1936 hingga 1942. Meskipun De Jonge telah digantikan, pengawasan ketat terhadap organisasi pergerakan tetap berlanjut. Organisasi politik seperti Parindra, Gerindo, dan Gapi tidak bisa melakukan banyak tindakan karena aktivitas politik mereka diawasi dengan ketat. Pada masa ini, aktivitas parlementer menjadi satu-satunya cara untuk mendekati pemerintah Hindia Belanda yang semakin mendekati masa kejatuhannya.

Kedudukan internasional Belanda semakin sulit, dan tekanan dari Indonesia untuk reformasi sosial dan politik semakin kuat. Parindra didukung oleh kalangan menengah ke atas dan cendekiawan, sementara Gerindo terdiri dari kalangan menengah ke bawah serta mantan anggota PKI. Anggota PNI lama menyebar ke berbagai partai, termasuk Parindra dan Muhammadiyah. Diperkirakan, sekitar 200.000 orang Indonesia aktif menentang pemerintahan kolonial, sedangkan yang pro-kolonial sangat sedikit.

Gabungan Politik Indonesia (GAPI), yang didirikan pada tahun 1939, bertujuan menuntut pemerintah Belanda untuk memberikan Indonesia parlemen sendiri, dengan slogan "Indonesia Berparlemen." GAPI lahir setelah gagalnya Petisi Sutarjo, yang meminta musyawarah antara wakil Indonesia dan Belanda. Permintaan GAPI yang tidak segera dipenuhi justru memperkuat organisasi ini. Kongres yang digelar oleh GAPI semakin kuat karena dihadiri oleh berbagai

kelompok masyarakat, termasuk buruh, wanita, pemuda, dan mahasiswa, yang menunjukkan dukungan kolektif mereka.

Meskipun begitu, pemerintah kolonial Belanda gagal menyadari keinginan rakyat untuk reformasi politik, terutama ketika menghadapi invasi Jepang. Kegagalan ini berujung pada penyerahan diri Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati.

Peran Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Pers memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, karena digunakan sebagai media utama oleh tokoh pergerakan untuk menyampaikan opini dan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pers juga mampu memobilisasi massa untuk mendukung perlawanan. Salah satu tokoh penting adalah Raden Mas Tirta Adhi Soerjo, yang mendirikan Sarekat Priyayi dan menerbitkan surat kabar Medan Prijaji pada 1907, serta majalah perempuan pertama, *Poetri Hindia*, pada 1908.

Semakin banyak elit terdidik yang sadar akan pentingnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, semakin tumbuh kesadaran untuk berjuang melalui organisasi pergerakan, yang menggunakan pers sebagai sarana komunikasi. Setiap organisasi pergerakan pada awal abad ke-20 memiliki surat kabarnya sendiri. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan Indonesia, metode perjuangan yang mereka gunakan berbeda satu sama lain.

Penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno berkaitan erat dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Peringatan pertama kali dilakukan pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, di mana Soekarno menyampaikan pidato tentang pentingnya kebangkitan nasional. Walaupun tidak ada catatan lengkap tentang pidato tersebut, inti dari pesan Soekarno adalah bahwa hari tersebut menandai Kebangkitan Nasional.

Tahun 1948 adalah periode penuh ketegangan di Indonesia, termasuk jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan ketegangan antara kelompok politik serta militer. Pada masa itu, terjadi konflik internal yang melibatkan berbagai partai politik seperti PNI, Masyumi, dan PSI. Situasi keamanan semakin memanas, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami ketegangan, ditambah dengan penculikan di beberapa daerah. Dalam kondisi ini, pasukan Siliwangi dari Jawa Barat dipindahkan ke Solo untuk menghindari ketegangan dengan Belanda sesuai Perjanjian Renville.

Untuk menyatukan berbagai pihak yang sedang berseteru dan mengarahkan energi bangsa melawan Belanda, Soekarno menetapkan 20 Mei, hari lahir Budi Utomo, sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan ini bertujuan untuk mengumpulkan kekuatan nasional, mengatasi perpecahan, dan merangkul berbagai partai politik. Peringatan di Solo pada 20 Mei 1948 melibatkan pasukan Siliwangi dan elemen-elemen pemerintahan dalam sebuah pawai yang menggambarkan kekuatan dan persatuan.

Ada dua alasan utama mengapa Budi Utomo dianggap sebagai simbol Kebangkitan Nasional. Pertama, organisasi ini memiliki struktur yang baru dan berbeda dari masa sebelumnya, dengan cabang-cabang di berbagai daerah, anggota yang terorganisir, dan rencana kerja yang jelas. Kedua, Budi Utomo menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi lain untuk bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan.

Namun, ada kritik terhadap penetapan ini karena beberapa pihak menganggapnya lebih bernuansa politis daripada akademis. Beberapa organisasi lain, seperti Jamiat Khair, telah berdiri sebelum Budi Utomo dan berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional. Jamiat Khair, yang didirikan pada 17 Juli 1905, memiliki tujuan utama mendirikan sekolah dan mendidik anak-anak muda, termasuk mengirim mereka ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan. Organisasi ini, meskipun tidak bersifat keagamaan semata, berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia melalui pendidikan formal yang terstruktur.

Fakta mengenai Budi Utomo dan keterlibatannya dengan Soekarno dalam penetapan Hari Kebangkitan Nasional menunjukkan beberapa aspek yang kontroversial. Meskipun 20 Mei 1908, tanggal berdirinya Budi Utomo, ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ada pandangan yang meragukan peran Budi Utomo sebagai pelopor gerakan kebangkitan nasional.

Budi Utomo, dalam Kongres 1928 di Solo, menolak gagasan persatuan Indonesia, menjadikannya organisasi yang tertutup bagi suku-suku di luar Jawa dan Madura. Selain itu, beberapa sejarawan, seperti Vlekke, menyatakan bahwa Budi Utomo sebenarnya dekat dengan pemerintah kolonial Belanda dan didirikan sebagai bagian dari kebijakan kolonial untuk menyeimbangkan pengaruh gerakan pendidikan Islam yang dimotori oleh Jamiat Khair, yang didirikan oleh kelompok Arab.

Selain keterkaitan dengan Belanda, Budi Utomo juga merupakan organisasi elit bangsawan Jawa yang lebih fokus pada kepentingan golongannya sendiri, alih-alih memperjuangkan kepentingan nasional yang lebih luas. Misalnya, dalam rapat-rapat mereka, bahasa Belanda lebih sering digunakan daripada bahasa Indonesia, dan diskusi lebih banyak berkisar pada perbaikan nasib masyarakat Jawa dan Madura.

Penetapan Budi Utomo sebagai simbol kebangkitan nasional juga mendapat kritik dari berbagai tokoh. K.H. Firdaus AN, mantan anggota Majelis Syuro Sarekat Islam, menyebut Budi Utomo sebagai organisasi etnis yang sempit dan tidak memiliki peran nyata dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan, Budi Utomo sudah bubar pada 1935, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945.

Sejarawan seperti Aspimarwan Adam dari LIPI dan Robert Van Niels juga mempertanyakan keputusan untuk menjadikan Budi Utomo sebagai simbol Kebangkitan Nasional, karena organisasi ini dinilai hanya memperjuangkan kepentingan golongan tertentu, tidak mencerminkan semangat kebangkitan nasional yang lebih inklusif. Mereka berpendapat bahwa kebangkitan nasional sebenarnya sudah dimulai dengan organisasi-organisasi lain yang lebih terbuka dan progresif.

Peran Generasi Muda dalam Belajar Sejarah NKRI

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya melalui penanaman nilai kebangsaan. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai peristiwa yang menunjukkan usaha untuk menggantikan konsensus nasional, seperti pemberontakan dan gerakan separatis. Namun, upaya tersebut dapat diatasi dengan semangat juang para pemuda yang tanpa pamrih berjuang untuk reformasi hingga saat ini. Nilai-nilai dasar konsensus nasional seharusnya menjadi landasan bagi pemuda dalam menumbuhkan rasa kebangsaan. Sayangnya, saat ini terjadi kemunduran dalam semangat kebangsaan, yang terlihat dari berkurangnya kesadaran terhadap

ideologi Pancasila dan Konstitusi, terutama di kalangan generasi muda. Laporan Kemengpora RI menyebutkan bahwa terdapat sepuluh masalah karakter bangsa yang dihadapi oleh generasi muda, seperti meningkatnya kekerasan dan budaya ketidakjujuran.

Untuk kemajuan bangsa Indonesia, generasi muda perlu meningkatkan perannya dalam menjaga keutuhan negara. Sebagai orang terdidik, kita seharusnya mencari solusi untuk masalah ini. Peran generasi muda dalam mendukung pemerintahan yang berdaulat menjadi tugas utama agar tercipta pemerintahan yang kuat dan stabil, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara penting dalam menjaga keutuhan NKRI adalah melalui penggunaan bahasa. Kesetiaan terhadap bahasa dapat menjadi alat yang efektif untuk memobilisasi kelompok dan sering digunakan dalam politik. Selain itu, kesetiaan terhadap bahasa bisa lebih kuat daripada kesetiaan terhadap negara, dan rasa kebersamaan dapat terwujud melalui penggunaan bahasa yang sama. Perbatasan wilayah juga merupakan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa di Indonesia.

Keberhasilan atau kemunduran suatu negara sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, karena mereka adalah penerus dan pewaris bangsa. Generasi muda harus memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang baik, semangat nasionalisme, jiwa saing, serta mampu memahami pengetahuan dan bertindak untuk menjaga lingkungan. Dalam era globalisasi, mereka juga harus memanfaatkan teknologi untuk bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memiliki keterampilan dan wawasan yang luas dalam menghadapi tantangan zaman.

Tantangan terbesar bagi generasi muda di masa depan adalah bagaimana mereka dapat melanjutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia di tengah pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Dampak globalisasi telah mempengaruhi moralitas generasi muda, yang terlihat dari banyaknya mereka yang terjerumus ke dalam perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keterlibatan dalam kriminalitas, narkoba, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, hasilnya belum maksimal. Oleh karena itu, kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat Indonesia menjadi solusi yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan ini dan menjaga keutuhan NKRI.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia, agar mereka dapat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Hal ini penting agar mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NKRI 1945, yang menjadi dasar negara Indonesia. Melalui PKn, para siswa diharapkan bisa berperan aktif dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertindak secara cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang mampu bersaing di dunia internasional tanpa kehilangan identitas budaya Indonesia (Saidurrahman, 2018; Madiung, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan kewarganegaraan diharapkan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam

mempertahankan kemerdekaan dan membangun NKRI. Pembelajaran sejarah pergerakan NKRI sangat penting bagi generasi muda sebagai langkah futuristik, karena dengan mengenal sejarah perjuangan bangsa, mereka akan lebih menghargai nilai-nilai kebangsaan dan memiliki semangat juang yang sama dalam menjaga keutuhan negara. Hal ini juga akan memperkuat identitas nasional mereka dalam menghadapi tantangan global di masa depan (Depdiknas, 2006).

Sebagai mata pelajaran yang sangat krusial dalam membangun karakter bangsa, PKn harus mampu mengadaptasi diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Melalui model pembelajaran yang mengedepankan latihan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta sosialisasi dengan lingkungan sekitar, PKn dapat menjadi sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh dan siap menghadapi tantangan dunia global. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan sejak tingkat dasar hingga menengah akan membekali siswa dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang berkualitas (Nurgiansah, 2022a; BSNP, 2006).

Implementasi Sejarah NKRI untuk Generasi Pemuda

Pemuda Indonesia saat ini dapat memainkan peran penting dalam implementasi nilai-nilai sejarah dan perjuangan yang terkandung dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejarah pergerakan nasional menunjukkan bagaimana peran penting pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan bangsa, dimulai dari organisasi-organisasi pemuda seperti Tri Koro Dharmo, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, dan Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 1928. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemuda untuk mewujudkan nilai-nilai sejarah NKRI: (Djalal, Hasjim, 2010)

1. **Memperkuat Kesadaran Nasional dan Identitas Bangsa**

Pemuda dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kesatuan bangsa. Menggunakan platform digital untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya sejarah NKRI, serta membangun rasa cinta tanah air yang inklusif, seperti yang dicontohkan oleh organisasi pemuda di masa pergerakan nasional yang mampu memperluas persaudaraan bangsa.

2. **Berperan dalam Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Sebagaimana yang dilakukan oleh Dewi Sartika dan tokoh perempuan lainnya dalam mendirikan sekolah-sekolah dan memajukan pendidikan bagi perempuan, pemuda saat ini dapat memperjuangkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan formal dan non-formal dapat menjadi salah satu langkah untuk memajukan bangsa.

3. **Menggunakan Media untuk Menyuarakan Kebenaran dan Keadilan**

Pers memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang relevan dengan perjuangan kemerdekaan. Pemuda kini dapat mengadaptasi peran ini melalui platform media sosial, blog, dan podcast untuk menyuarakan isu-isu sosial yang berkaitan dengan keadilan, pemerintahan yang transparan, serta melawan diskriminasi. Dengan menggunakan media sebagai sarana perjuangan, pemuda dapat terus mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dan membangun solidaritas yang lebih kuat.

4. Menjaga Persatuan dalam Keberagaman

Sejarah perjuangan nasional mengajarkan kita tentang pentingnya bersatu dalam keragaman, sebagaimana yang ditekankan dalam Sumpah Pemuda. Pemuda dapat memperjuangkan nilai ini dengan memperkuat toleransi antar agama, suku, dan budaya. Ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman.

5. Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan Sosial

Sejarah perjuangan Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan bukan hanya untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk keadilan sosial. Pemuda dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dengan aktif dalam gerakan sosial, advokasi hak asasi manusia, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya distribusi sumber daya yang lebih merata di Indonesia.

6. Berperan dalam Kekuatan Ekonomi Nasional

Mengingat peran kaum intelektual dan buruh dalam sejarah pergerakan nasional, pemuda saat ini dapat fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta berinovasi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan berperan aktif dalam dunia ekonomi, pemuda dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk lebih mandiri.

Negara kesatuan adalah bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi. Satuan-satuan subnasional hanya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan memiliki beberapa keunggulan, antara lain struktur pemerintahan yang lebih sederhana dibandingkan dengan negara federal. Selain itu, jika terdapat kekurangan tenaga ahli dalam pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyiapkan tenaga ahli tersebut. Negara kesatuan juga cenderung lebih stabil dalam mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena daerah yang kurang maju dapat menerima anggaran dan subsidi dari pusat. Selain itu, negara kesatuan juga mengurangi potensi separatisme karena pemerintahan tetap dikendalikan oleh pusat. (Santoso, Karim, et al., 2023c).

KESIMPULAN

Pergerakan nasional Indonesia dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang menandai kebangkitan kesadaran nasional. Sebelum tahun 1900, perlawanan terhadap penjajahan lebih bersifat lokal dan tidak terorganisir. Namun, setelah 1900, perjuangan mulai lebih terstruktur dengan fokus pada politik dan sosial, didorong oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Kaum pemuda dan perempuan turut berperan penting, dengan munculnya organisasi pemuda dan sekolah-sekolah perempuan yang mendorong kesadaran nasional.

Masa krisis yang dimulai sekitar 1929 menandai penguatan solidaritas rakyat meskipun mendapat tindakan represif dari pemerintah kolonial. Organisasi seperti Parindra, Gerindo, dan GAPI berusaha mendorong reformasi politik dan pembentukan parlemen Indonesia. Namun, kegagalan pemerintah kolonial untuk memahami keinginan rakyat mempercepat proses perjuangan, yang berujung pada penyerahan diri Belanda kepada Jepang pada 1942, menandai akhir dari era kolonial.

Peran pers dalam perjuangan nasional juga sangat signifikan, menjadi media untuk

menyampaikan kritik terhadap pemerintahan kolonial. Tokoh seperti Raden Mas Tirta Adhi Soerjo menggunakan pers untuk memobilisasi massa dan memperkuat semangat perjuangan. Meskipun ada kritik terhadap penetapan Budi Utomo sebagai simbol Kebangkitan Nasional, organisasi ini tetap dianggap sebagai pelopor bagi gerakan nasional yang lebih inklusif di kemudian hari.

Generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan NKRI dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai sejarah bangsa. Peran mereka mencakup memperkuat kesadaran nasional, memperjuangkan pendidikan merata, memanfaatkan media untuk menyuarakan keadilan, menjaga persatuan dalam keberagaman, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter generasi muda, menanamkan semangat nasionalisme, dan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Globalisasi dan tantangan moralitas generasi muda menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, pendidikan sejarah perjuangan bangsa perlu diintegrasikan dengan pendekatan yang relevan, seperti pembelajaran kritis dan kolaboratif. Dengan memahami sejarah, generasi muda dapat menghargai perjuangan pendahulu mereka dan berkomitmen menjaga keutuhan bangsa.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, serta pemanfaatan teknologi yang bijak, generasi muda dapat terus membangun Indonesia yang berkeadilan sosial, bersatu dalam keberagaman, dan kompetitif di dunia internasional. Upaya ini menjadi kunci untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan dan mewujudkan pemerintahan yang kuat serta stabil di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akob, B., & Junaidi, T. (2014). Malaise dan pengaruhnya terhadap gerakan nasional Indonesia. *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), Juli-Desember.
- Kurniawati, A. F., dkk. (2015). Politieke Inlichtingen Dienst (PID) pada masa pemerintah Hindia Belanda tahun 1916-1942. *Jurnal CANDI*, 12(2).
- Husda, H. (2019). Rekonstruksi sejarah kebangkitan nasional. *Jurnal Adabiya*, 21(2).
- Rudiyanto, & Dewi, N. K. (2013). Peranan Gabungan Politik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1939-1941. *Makalah, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.
- Suwirta, A. (Tahun tidak diterbitkan). Zaman pergerakan, pers, dan nasionalisme di Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Yanti, R. M. (2017). Lahirnya pergerakan perempuan Minangkabau pada awal abad XX. *Jurnal Kafa'ah*, 7(2).
- Yasmis. (2007). Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), Juli-Desember.
- Yulianti, C., dkk. (Tahun tidak diterbitkan). Peranan pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1908-1928. *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember*.
- Ricklefs, M. C. (2010). *Sejarah Indonesia modern: 1200-2008*. Serambi.
- Utomo, C. B. (1995). *Dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia: Dari kebangkitan hingga kemerdekaan*. IKIP Semarang Press.

- Ohorella, G. A., dkk. (1992). *Peranan wanita Indonesia dalam masa pergerakan nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia abad ke-20*. Kanisius.
- Kartodirjo, S., dkk. (1977). *Sejarah nasional Indonesia V*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka.
- Suhartono. (1988). *Sejarah pergerakan nasional: Dari Budi Utomo sampai proklamasi 1942-1945*. Pustaka Pelajar.
- Sudiyo, O. (1997). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia: Dari Budi Utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Malaka, T. (2008). *Dari penjara ke penjara*. Narasi.
- Djalal, Hasjim. 2010. *75 Tahun Prof. Hasjim Djalal: Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. PrePrint Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6.
- Dewa, M., & Putri, Y. (2022). Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Bahasa Indonesia di SMP Muhammdiyah 5 Surakarta. *Belaindika*, 4(2), 52–56.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.